

POTRET UMKM INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Budianto Tedjasuksmana
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

ABSTRACT

The environmental aspects should be reflected especially within small and medium scale enterprise (SME) as known UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah in Indonesia. The parties which concerns with these prospect any kind of UMKM would make an advance to compete at Asean's Economics Community 2015. The changing international trade system tends to liberalization as ASEAN tends to AFTA and on going to be ECONOMICS COMMUNITY of ASEAN. Those factors which formed the UMKM should be examined firmly as their categorization, then the threats of entering the free market should be focused on the probability to be stand alone. The lowest segments in metropolitans, are so difference with those UMKM that served the smallest town especially relates with social citizenship. The governnment policies have already made for advancing UMKM. The problem should be questioned as have any UMKM of Indonesia could have competition in ASEAN, at least hold out within domestic market. The aim of this writing to discuss the ways of advancing UMKM Indonesia which could be the one as the competitive supplier entering ECONOMICS COMMUNITY of ASEAN in the coming year 2015.

Keywords: Categorization, The Ways Advancing of UMKM.

PENDAHULUAN

Deklarasi Komunitas Ekonomi ASEAN bertujuan membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang menggerakkan para pelaku usaha, suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Dari pendasaran tujuan ini tampak bahwa akan timbul berbagai aliran investasi, penghapusan tarif dan faktor-faktor lain secara progresif, yang dapat dituangkan dalam prosedur, kebijakan, regulasi dan peraturan lainnya di dalam upaya mengurangi hambatan-hambatan demi kemajuan bersama, adanya pemberlakuan sertifikasi dan standardisasi atas produk dan jasa, sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Dalam cetak biru yang ada disebutkan adanya perhatian mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. *Asean Policy Blueprint for SME Development APBSD* menguraikan kerangka kerja untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di kawasan ASEAN.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memahami kondisi UMKM kita sehingga mengarahkan kepada suatu potret pemetaan tentang suatu strategi yang diharapkan dapat membangun keunggulan daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Indonesia dalam Era Perekonomian Baru yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN. Argumentasi pemikiran ini didasarkan pada data bank dunia tentang income perkapita di antara negara ASEAN sebagai berikut:

Tabel 1. Income Perkapita ASEAN 2012

No	Negara	Pendapatan Perkapita
1.	Singapura	US\$ 57,238
2	Brunei Darussalam	US\$ 47,200
3.	Malaysia	US\$ 14,603
4.	Thailand	US\$ 8,643
5.	Indonesia	US\$ 4,380
6.	Philippines	US\$ 3,725
7.	Vietnam	US\$ 3,725
8.	Laos	US\$ 2,435
9.	Kamboja	US\$ 2,086
10.	Burma	US\$ 1,900
11	Myanmar	US\$1,246

Tujuan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh pemerintah bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional pada masa periode pemerintahan sekarang ini, dilakukan dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang memadai, mendorong meningkatnya pendapatan. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain

utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan lain-lain.

Suarja (2007) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, indeks tentang angka harapan hidup (tingkat kesehatan), penguasaan pengetahuan (pendidikan) serta standar kehidupan yang layak, yang dihitung dari pendapatan perkapita, pada tahun 2003 Indonesia berada pada angka 112 dari 175 negara. Sedangkan Indeks Kemiskinan Manusia pada tahun yang sama berada pada peringkat 33 dari 94 negara. Adakah kemajuan yang sangat signifikan yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Suatu refleksi sampai sejauh mana langkah-langkah yang telah dilaksanakan mendekati tujuannya. Dari berbagai sumber sering didengar dan juga dapat dijumpai hal-hal umum yang sering terjadi dalam kebanyakan UMKM di Indonesia, yaitu manajemen usaha yang lebih bersifat perorangan dan melibatkan keluarga, dan kerabat dekat, sehingga usaha yang berakta notaris dilaporkan hanya 1,7% saja, selain itu adanya akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal yang rendah, keterbatasan dan kesulitan dalam pengadaan bahan baku pada UMKM yang berorientasi ekspor, lemahnya kompetensi pada sumber daya manusia serta banyak hal lainnya. Data dari UKM Center UI, menyebutkan bahwa UKM di Indonesia yang kuat hanyalah 10–16% dari 53 juta, itupun di sektor informal. Ketidakseriusan pihak pemerintah secara komprehensif dalam menangani pelaku UMKM dapat dirasakan, apalagi seandainya dibukanya pintu masuk produk UMKM asing ataupun operasional lembaga UMKM asing secara besar-besaran di Indonesia yang mana dapat menimbulkan efek psikologis bagi pelaku UMKM itu sendiri. Apakah operasionalisasi Shell membawa dampak pada layanan Pertamina, hal ini dapat dijawab dengan membandingkannya dengan keadaan sebelumnya.

KAJIAN TEORI

Keahlian/Kompetensi Sumber Daya Manusia

Ardiana dkk (2010) memaparkan bahwa dari 140 responden pengusaha UMKM 2008 di Surabaya, memiliki beraneka latar belakang taraf pendidikan yaitu Sekolah Dasar berjumlah 21 orang, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 17 orang serta Sekolah

Menengah Umum berjumlah 72 orang. Dari paparan data penelitian tersebut disimpulkan bahwa sebanyak 73% pengusaha UMKM berlatar belakang pendidikan di bawah S1, dengan sebaran umur yang relatif muda, yaitu < 25 tahun sejumlah 22 orang, pengusaha berumur 25 sampai dengan 30 tahun berjumlah 25, dan umur 30,01 sampai 35 tahun berjumlah 32 orang, dan umur 35,01 sampai dengan 40 tahun berjumlah 23 orang, pada aspek pengelolaan lama usaha disebutkan berkisar 10–20 tahun sejumlah 36%. Jadi dapat disimpulkan dalam pengelolaan UMKM terdapat keterbatasan manajerial. Sampai seberapa tingkat kompetensi yang terdiri dari *Knowledge, Skill dan Ability* yang dimiliki anggota UMKM? Tentu tidak dapat disangkal bahwa kecakapan dalam pengetahuan menyangkut banyak aspek-aspek misalnya dorongan individu, dampak dan hasil, daya analisis, berpikir strategis, berpikir kreatif, ketegasan dalam mengambil keputusan, penilaian secara komersial, tim manajemen dan kepemimpinan, kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi perubahan dan tekanan, kemampuan merencanakan dan mengendalikan proyek.

Uraian di atas dapatlah dimaklumi dengan melihat paparan data dari Data Pusat Statistik pada halaman berikut, bahwa pada tahun 2012 jumlah penduduk dengan usia 16–18 tahun, yang tidak melanjutkan pendidikan cukup besar yaitu berkisar 37,77% dan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi sejumlah 82,86%. Bagaimana mungkin di salah satu pihak mengupayakan pengembangan dan lahirnya UMKM baru, akan tetapi kompetensi sumber daya UMKM itu sendiri, sebagai komponen pengelola tidak diperhatikan. Perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan juga baik, buktinya pos dana Bantuan Operasional Sekolah cukup besar, yaitu kisaran 20%. Yang mana hal ini telah bergulir cukup lama, akan tetapi pada tabel tampak adanya masyarakat yang belum menyelesaikan dengan tuntas jenjang pendidikannya. Tampaknya hal ini menunjukkan suatu hal yang bersifat tambal sulam. Jika pengelolaan dana BOS berjalan sebagaimana mestinya, tentunya personal yang mengelola UMKM rata-rata memiliki kompetensi minimal, sehingga diharapkan pengguliran dana yang ada baik untuk tumbuhnya UMKM yang baru ataupun pengembangan dari UMKM yang sudah berjalan, bisa menghasilkan kinerja dan kemajuan UMKM tersebut menjadi lebih baik, sehingga nantinya akan menyerap tenaga kerja baru sebagai akibat dari tingginya tingkat permintaan dari produk yang dihasilkannya. Dengan demikian tingkat pengangguran pada usia produktif dapat diminimalisir, yang mana dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat jauh lebih baik dari hari sebelumnya.

Moorthy dkk. (2012:224-239) dalam penelitiannya terhadap 7443 UMKM di Malaysia menyatakan bahwa variabel *effective entrepreneurship*, manajemen sumber daya manusia, informasi pemasaran dan aplikasi teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Perlu dicatat bahwa pengelola UMKM yang berusia 26–35 tahun sejumlah 17,7% sedangkan usia 36–45 tahun sejumlah 40,7% dan sejumlah 40,2% berumur di atas 46 tahun. Jenjang pendidikan Diploma sebanyak 44,5%, dan Strata 1 sebanyak 50,7%, suatu tugas bagi Indonesia dalam keseriusan menangani UMKM.

Tabel 2. Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 7-24 Tahun 2011-2012

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	2011			2012		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Â Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Â Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-Laki						
7-12	1,62	97,36	1,02	1,37	97,79	0,84
13-15	0,93	86,54	12,53	0,77	88,67	10,56
16-18	0,96	58,11	40,93	0,82	61,24	37,94
19-24	1,13	14,94	83,94	0,91	15,93	83,16
7-24	1,26	66,19	32,56	1,05	67,07	31,88
Perempuan						
7-12	1,43	97,81	0,75	1,13	98,21	0,67
13-15	0,75	89,12	10,13	0,76	90,91	8,33
16-18	0,90	57,57	41,53	0,80	61,61	37,58
19-24	1,37	13,61	85,02	1,11	16,34	82,55
7-24	1,22	64,49	34,29	1,01	67,03	31,96
Laki-Laki + Perempuan						
7-12	1,53	97,58	0,89	1,25	97,99	0,75
13-15	0,84	87,78	11,37	0,77	89,76	9,47
16-18	0,93	57,85	41,21	0,81	61,42	37,77
19-24	1,25	14,26	84,49	1,01	16,13	82,86
7-24	1,24	65,36	33,40	1,03	67,05	31,92

Sumber: BPS

Menyadari akan permasalahan tersebut di atas, maka fokus pemberdayaan UMKM mestinya pada penguatan kapasitas atau kualitas Sumber Daya Manusiannya. Apalagi, menurut BPS (1998) pada waktu itu, jadi 16 tahun yang lampau, bahwa sebagian besar atau 97,4% usaha kecil di Indonesia berpendidikan jenjang SLP ke bawah. Tingkat pendidikan

yang rendah ini bisa mempengaruhi semangat jiwa kewirausahaannya (*entrepreneurship spirit*). Apakah koneksitas antara permasalahan UMKM dengan jenjang pendidikan masyarakat serta penggelontoran dana BOS membawa capaian atau pengaruh secara signifikan?

Sumber Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyebutkan bahwa UMKM mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia dengan asumsi dukungan perkembangan wirausaha sebanyak 6,67 juta dalam lima tahun, maka dari prediksi tersebut nampaknya usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru. Jika pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten, maka sasaran pengangguran bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan. Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sulit mewujudkannya apabila masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, akibat ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata.

Apabila pengembangan wirausahawan seperti proyeksi matematis tercapai tentunya tingkat partisipasi angkatan kerja sangat baik. Sumber data dari BPS terkini memaparkan data seperti berikut ini, yang menyiratkan suatu muatan tafsir yang berbeda.

**Tabel 3. Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan
Tahun 2013 - Maret 2014**

Jenis Kegiatan	2013		2014
	Februari	Agustus	Februari
1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas	178 774 131	179 967 361	181 169 972
2 Angkatan Kerja	123 635 733	120 172 003	125 316 991
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,16	66,77	69,17
b. Bekerja	116 436 521	112 761 072	118 169 922
c. Pengangguran Terbuka *)	7 199 212	7 410 931	7 147 069
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,82	6,17	5,70
3 Bukan Angkatan Kerja	55 138 398	59 795 358	55 852 981
a. Sekolah	15 189 891	14 630 852	15 899 591
b. Mengurus Rumah Tangga	32 848 740	36 036 779	32 853 393
c. Lainnya	7 099 767	9 127 727	7 099 997

Sumber: BPS

Sasaran pembangunan ekonomi hanya dapat dicapai dengan adanya sinergi kebijakan dan program pembangunan ekonomi lintas sektoral, terutama perlu adanya sinergi program pembangunan antar instansi pemerintah, serta sinergi pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Sasaran pembangunan di atas dapat dicapai jika menggandeng Koperasi, yang mana telah dikenal masyarakat. Sehingga KUMKM (koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah) dapat dijadikan sebagai motor inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga mampu memberikan lapangan kerja.

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia seyogyanya sudah dilaksanakan secara konkrit dan serius dalam waktu 10–20 tahun yang lampau. Suatu refleksi yaitu apakah tahun 2015, dimulainya Komunitas Ekonomi ASEAN dapat menghantarkan UMKM menjadi harapan di masa depan, paling tidak dapat dilihat dari beberapa aspek seperti berikut ini:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Pendampingan manajerial UMKM perlu dipertimbangkan dengan melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai pelaksanaan tridarma. Apalagi tidak disangkal bahwa UMKM masih memiliki keterbatasan berbagai kompetensi dan keahlian lainnya, termasuk pemahaman dalam akuntansi. Aufar (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel jenjang pendidikan, ukuran perusahaan, lamanya perusahaan serta latar belakang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi, khususnya pada 51 UMKM, pihak rekanan PT PLN (Persero) di Bandung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola UMKM berpengaruh pada banyak hal diantaranya kelangsungan hidup dari UMKM itu sendiri.

Aspek Manajemen Pendanaan dan Pemasaran

Berbicara lembaga pendanaan sebagai institusi penyedia modal bagi suatu usaha, maka tidaklah dapat dilepaskan dari kaca mata perbankan mengamati informasi keuangan dari suatu usaha yang dapat memberikan deskripsi tentang sumber dan penggunaan dana yang disajikan dalam bentuk *cash flow*. Dengan demikian, kelayakan suatu usaha dilihat dari

kemampuannya dalam menghasilkan GOFG, *gross operating fund generation*, selisih antar laba operasional dikurangi oleh pajak, bunga, dan dividen. Selama GOFG-nya positif, maka secara teknis perbankan pada umumnya memberikan pendanaan pengembangan. *Second way out*-nya dalam bentuk jaminan dilakukan oleh pihak bank apabila manajemen perusahaan menunjukkan keterbatasan dalam kemampuan mengkompensasi risiko sekalipun GOFG-nya positif. Dengan mengacu kepada misi KCU yang mengutamakan kelayakan usahanya, maka bank pada umumnya memerlukan informasi keuangan yang lengkap dan akurat. Dengan demikian usaha yang layak bagi pengusaha kecil haruslah dapat menghasilkan perolehan laba yang tinggi. Hal ini mengingatkan pengusaha kecil pada umumnya tidak banyak memiliki aktiva tetap yang besar sehingga sumber non tunainya relatif kecil.

Sumber LPDB–KUMKM pada 11 Oktober 2013 menyebutkan bahwa Lembaga Pendanaan Dana Bergulir UMKM dan PT PLN mengadakan perjanjian bersama dimana jumlah dana tersalur kepada UMKM sebesar 3,7 triliun. Sering didengar bahwa pembangunan banyaknya UMKM dan juga akhir-akhir ini dengan menggandeng Koperasi dimaksudkan membantu upaya meningkatkan pendapatan per kapita, dan sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurunnya angka kemiskinan juga terkait erat dengan menurunnya inflasi yang disumbang oleh menurunnya harga riil bahan pangan, sehingga membawa para penerima upah tetap dapat meningkatkan pengeluaran riilnya di tengah pendapatan per-kapita yang terus merosot serta catatan penting untuk melihat jumlah penduduk miskin didasarkan pada angka pengeluaran penduduk. Tetapi refleksi apa yang dapat diperoleh setelah melihat paparan data terkini tentang garis kemiskinan di masyarakat, yang tampak pada tabel pada halaman berikut ini.

Banyak sektor yang bisa dikembangkan dan mendapat perhatian sebagaimana UMKM Malaysia pada masa mendatang lebih berorientasi pada pengembangan bioteknologi, demikian pula UMKM Thailand mengikutsertakan berbagai UMKM dalam menghasilkan produk otomotif. Bagaimana dengan UMKM Indonesia? Sektor kegiatan yang berkaitan dengan perkebunan, perikanan dan industri pengolahan adalah kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan penciptaan kekuatan awal bagi usaha ekonomi rakyat untuk mendapatkan pangkalan bergerak di usaha skala besar bernilai tambah tinggi. Hal ini juga akan membangun kesinambungan usaha ekonomi rakyat di sektor primer "yang

lebih tradisional" menjangkau sektor pengolahan yang "modern". Pemerintah seharusnya memperluas akses UKM terhadap sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan potensi setempat, terutama sumber daya alam. Untuk memungkinkan peningkatan kemampuan UKM dalam memanfaatkan peluang lokal dan pasar global perlu didukung dengan pengembangan lembaga pendamping yang diharapkan mampu menyediakan dukungan perkuatan untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam memperoleh akses teknologi dan pasar (non finansial) maupun akses terhadap permodalan. Dalam kaitan ini tumbuhnya lembaga pelatihan serta yang menyediakan jasa bagi UKM secara wajar perlu dikembangkan secara meluas.

Tabel 4. Garis Kemiskinan Maret 2014

Propinsi	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
Aceh	383 186	350 204	359 504
Sumatera Utara	338 234	299 145	318 398
Sumatera Barat	374 968	333 511	349 656
Riau	375 286	357 009	364 176
Kepulauan Riau	421 733	385 071	415 800
Jambi	379 183	291 534	318 262
Sumatera Selatan	336 929	277 509	298 824
Bangka Belitung	439 377	448 817	444 171
Bengkulu	362 614	325 261	336 930
Lampung	336 927	295 931	306 600
DKI Jakarta	447 797	-	447 797
Jawa Barat	288 742	277 645	285 013
Banten	315 239	281 925	304 636
Jawa Tengah	279 036	267 991	273 056
DI Yogyakarta	327 273	286 137	313 452
Jawa Timur	287 582	278 429	282 796
Bali	310 321	271 646	295 210
Nusa Tenggara Barat	307 147	274 136	287 987
Nusa Tenggara Timur	337 367	248 606	265 955
Kalimantan Barat	291 533	279 049	282 835
Kalimantan Tengah	307 382	323 556	318 094
Kalimantan Selatan	322 006	298 656	308 512
Kalimantan Timur	448 220	404 554	431 560
Sulawesi Utara	265 093	257 845	261 117

Propinsi	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
Gorontalo	246 633	241 936	243 547
Sulawesi Tengah	336 900	303 975	311 993
Sulawesi Selatan	240 276	211 271	222 003
Sulawesi Barat	235 934	233 215	233 838
Sulawesi Tenggara	241 921	226 220	230 627
Maluku	362 783	345 536	352 208
Maluku Utara	321 231	286 242	295 787
Papua	404 944	338 206	355 380
Papua Barat	416 158	389 812	397 662
Indonesia	318 514	286 097	302 735

Sumber: BPS

Aufar (2013), dalam penelitiannya melakukan pengamatan terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi, khususnya pada 51 UMKM, pihak rekanan PT PLN (Persero) di Bandung, di sini menyiratkan bahwa aspek permodalan harus dipertanggungjawabkan, agar apabila terdapat pengajuan tambahan untuk pemenuhan kebutuhan dana sebagai bentuk pengembangan UMKM dapat dipenuhi oleh pihak lembaga pendanaan. Apakah diperlukan pendampingan dengan melibatkan perguruan tinggi khususnya dalam hal manajerial dan teknis penyusunan laporan keuangan khususnya laporan arus kas? Tujuan dari hal ini adalah timbulnya jembatan antara dunia praksis bagi mahasiswa atas konsep-konsep yang telah diserapnya. Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pendekatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyatakan bahwa usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok usaha mikro masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lain lain. (Kementian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah). Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri,

melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industri pedesaan.

Pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu memperoleh perhatian, sebab hal ini mengingat: keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru, yang notabene adalah UKM, karena memiliki ICOR yang rendah dengan *lag* waktu yang singkat. Jika pembangunan ekonomi difokuskan pada sektor formal (usaha besar dan investasi asing) maka pertumbuhan ekonomi relatif sulit dicapai dalam waktu singkat, karena umumnya ICOR usaha besar memiliki *lag* waktu 2–3 tahun, yang artinya dampak pertumbuhannya baru terasa pada waktu mendatang.

Pembangunan sektor UMKM di tingkat kota dan kabupaten yang menggerakkan sektor riil, karena keterkaitannya dengan industri yang cukup tinggi, diharapkan akan menjadi tumpuan pengembangan sistem perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, mengingat *non-performing* loannya yang relatif sangat rendah..

Infrastruktur, Logistik dan Pasar

Mempertimbangkan UMKM umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Pembangunan Koperasi dan UMKM sebenarnya harus tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Di negara Korea pengembangan UMKM yang ada pada dasarnya ditata dengan konsep OVOP (*One Village One Product*). Sedangkan di Jepang sebuah negara industri UMKM yang ada ditopang dengan industri kecil yang ada. UMKM di Thailand dan Korea dibangun dengan pembentukan pola *cluster* dimana perencanaan yang dilakukan melihat realita pasar. Jadi produk yang dihasilkan diserap oleh pasar dengan baik. Pemerintah Thailand lebih memperhatikan pengembangan ekonomi di pasar rumput, yang lebih dikenal sebagai OTOP (*One Thambun One Product*). Pemahaman *thambun* dapat digambarkan dengan suatu wilayah mencakup kecamatan di Indonesia.

Agglomerasi optimal diharapkan dapat menghasilkan sinergi efisiensi dan kemajuan keberlanjutan, sebab dengan pembentukan *cluster* yang baik akan membawa keberhasilan dalam efisiensi serta keberlanjutan yang lebih baik di waktu mendatang serta tangguh dalam menghadapi persaingan. Punyasavatsut dalam penelitiannya menemukan bahwa UMKM di Thailand melakukan integrasi dalam memasuki pasar global yaitu *production network, subcontracting, and networking* dengan perusahaan multinasional dalam upayanya melakukan peremajaan, pembaharuan, teknologi yang dimiliki serta kemampuan manajerial yang ada..

Peran pemerintah seyogyanya difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat bagi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah, serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, serta memberikan dukungan perkuatan bagi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah. Sekarang ini Kementerian Koperasi dan UKM diinformasikan telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan tentunya dapat dievaluasi bersama setelah pelaksanaannya, apakah hasil yang dicapai pada tahun-tahun mendatang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sinaga dalam Kompas (2008), memaparkan bahwa jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 13.450 unit dengan 12.625 000 pedagang. Adanya pertumbuhan pasar modern 31,4%, menyebabkan adanya penurunan pasar tradisional 8,1% atau hal ini dapat dikatakan setiap tahunnya terdapat penutupan 450 kios. Dalam penelitiannya Zein (2004), menyebutkan bahwa masyarakat Jakarta lebih memilih pasar modern yaitu 43,75% supermarket, 27,88% mini market dan sebanyak 8,37% memilih pasar tradisional. Pemiik warung kecil terganggu dengan tumbuhnya mini market sejumlah 78%, sedangkan jumlah prosentase yang terganggu dengan beadanya supermarket 60%, dengan pengamatan penelitian pada 5 wilayah Jakarta. Banyak dijumpai adanya mini market di berbagai kota besar. Apakah pasar-pasar modern ini yang saling berdekatan keberadaannya merupakan perwujudan dari bentuk UMKM?

KESIMPULAN

Pemberdayaan UMKM hanya akan terjadi secara nyata apabila dapat dijamin kesempatan seluas-luasnya bagi UKM untuk memasuki kegiatan ekonomi. Dukungan yang diperlukan terutama bantuan peningkatan kemampuan untuk memperoleh akses pasar,

teknologi dan permodalan yang dikembangkan melalui bank maupun bukan bank. Pencairan kucuran dana dari sumber apapun perlu dikaji lebih mendalam, berapa prosentase dana yang diterima, sebab bisa terjadi kemungkinan bahwa pencairan dana sangat kecil, selain itu perlu dilakukan penelitian apakah lembaga pendanaan tersebut meminta agunan aset, sementara UMKM pada umumnya terbatas dalam kepemilikan aset tetap. Kepedulian mewujudkan visi dan misi dari lembaga keuangan yang hanya berorientasi pada “menyalurkan” dana seyogyanya tidak selalu berorientasi pada motif keuntungan, dengan kata lain apakah bentuk partisipasi kucuran dana yang ada kepada usaha kecil yang membutuhkan pendampingan dana bersifat ”kooperatif” murni?

Pandangan dari perusahaan besar yang telah masuk dalam dunia perdagangan internasional, seyogyanya diatur oleh kebijakan pemerintah, yaitu sekurang-kurangnya menggandeng UMKM sebagai mitra. UMKM sebagai bagian penting dari perusahaan tersebut, seperti yang dilakukan *incubator* IPB. Dengan adanya kolaborasi tersebut akan membawa pengaruh dalam banyak aspek. Keikutsertaan *incubator* UMKM dalam pameran nasional dan internasional diharapkan membuahkan hasil positif. Melihat uraian ini seyogyanya Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan mengikutsertakan dunia perguruan tinggi, khususnya dalam transfer keahlian bagi para anggota UMKM, dalam wadah *incubator* agar dapat membantu meningkatkan upaya kinerja yang lebih baik, baik dalam pendampingan manajemen dan ketrampilan lainnya. Pada akhirnya meskipun kemiskinan dapat dikurangi melalui pertumbuhan dengan pemerataan, namun bagi kelompok miskin yang rentan masih memerlukan intervensi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizali, A. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM, survei pada Perusahaan Rekanan PT PLN Bandung.*
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI. 2009. *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT).*
- Lim, H. 2008. *SMEs for Development Policy Environment and Challenges on Singapore.* Singapore Institute for International Affairs.
- Ardiana, I. D. K. R. 2010. Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.* Vol. 12. No. 1.

Zein, I. 2004. *Lembaga Pengembangan Bisnis Harmoni*.

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. LPDB- KUMKM.

Moorthy, M. K., A. Tan, C. Choo, Chang S. W., J. Tan Yong Ping, dan Tan Kah Leong. 2012. A Study on Factors Affecting The Performace of SME in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 2. No. 4. ISSN: 2222-6990.

Sinaga, P. 2008. *Menuju Pasar yang Berorientasi pada Perilaku Konsumen*.

Policy Paper No. 15. 2013. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia*.

Punyasavatsut, C. 2008. SMEs in the Thai Manufacturing Industry: Linking with MNES. Limited Edition. *ERIA Research Project Report*. 2007-5. p.287-321.

Abu Bakar, S. B. 2007. *Factors Contributing to The Success Of Biotexhnology in SMEs in Malaysia*. Universiti Sains Malaysia.

Suarja, W. 2007. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Konvensi Nasional*. Februari.